SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat publik serta perorangan.
2. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip dinamis berdasarkan kewenangan penggunaan arsip yang berkaitan dengan pelaksaaan tugas dan fungsi tertentu.
3. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dengan cara mengelompokkan.
4. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanan yang telah ditetapkan.
5. Pencipta Arsip adalah Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Komisi Yudisial dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
8. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah seluruh arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di unit kerjanya.
9. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan dan urusan ketatausahaan pada Pencipta Arsip.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal Pencipta Arsip untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
11. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.
12. Arsip Biasa/Umum/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak/publik tidak merugikan siapapun.
13. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum,

termasuk dampak ekonomi makro dan apabila terdapat informasi yang bersifat sensitif pada arsip maka berpotensi juga menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

14. Arsip Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Komisi Yudisial yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan hasil pengujian konsekuensi yang telah dilakukan oleh Pencipta Arsip dan sesuai dengan ketentuan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
17. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
18. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari Komisi Yudisial.
19. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar Komisi Yudisial.

20. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Eselon II atau pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Yudisial dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial meliputi:

a. Klasifikasi Keamanan Arsip, meliputi informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, dan rahasia;
b. Pengamanan Arsip, meliputi pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola Arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangan rahasia; dan
c. Klasifikasi dan pengaturan akses Arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 3

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial bertujuan:

a. mendorong Unit Pengolah untuk memberkaskan Arsip Dinamis yang ada di unit kerjanya secara tertib yang dan disertai dengan daftar arsip aktifnya;
b. memberikan petunjuk kepada Unit Pengolah untuk mengamankan dan mematuhi kewenangan Akses Arsip terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
c. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan,

keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terpenuhi;

d. untuk mengatur Akses Arsip Dinamis yang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;
e. sebagai pedoman yang bersifat baku dalam melakukan pengamanan Arsip Dinamis dan penentuan hak Akses Arsip Dinamis; dan
f. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.

BAB III
KETENTUAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) arsip yang tercipta di Komisi Yudisial dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, dan rahasia;
(2) ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat keamanannya;
(3) ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
(4) setiap pegawai di Komisi Yudisial hanya dapat mengakses arsip yang berada dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya; dan
(5) publik dapat mengakses informasi Komisi Yudisial yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PPID.

Pasal 5

(1) Asas Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis Komisi Yudisial dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
(2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
(3) Penetapan kebijakan sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penyusunan dan penerapan pedoman;
    b. standar operasional prosedur;
    c. sumber daya manusia; dan
    d. sarana dan prasarana.

Pasal 6

Arsip Dinamis Komisi Yudisial terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Arsip Biasa/Umum/Terbuka;
b. Arsip Terbatas; dan
c. Arsip Rahasia.

Pasal 7

(1) Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak.
(2) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan meliputi fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas *(CCTV)*, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
(3) Pengamanan Arsip pada perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Arsip kategori Biasa/Umum/Terbuka disimpan di *filling cabinet*/rak;
    b. Arsip kategori Rahasia bersifat terbatas dan disimpan di brankas atau lemari besi;

c. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
d. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

(4) Pengamanan Arsip pada perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 8

(1) Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak.
(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
(3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 9

(1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di Komisi Yudisial meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
(2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 10

Arsip Dinamis di Komisi Yudisial yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa/Umum/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

a. arsip dinamis pada Biro Umum meliputi Bagian Keuangan, Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
b. arsip dinamis pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal meliputi Bagian Perencanaan dan Hukum serta Bagian Kepatuhan Internal; dan
c. arsip dinamis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi meliputi Bidang Analisis dan Bidang Data dan Layanan Informasi.

Pasal 11

Arsip Dinamis di Komisi Yudisial yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan BAPERJAKAT/Tim Penilai Kinerja, pelantikan, rekam medis pegawai, pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial;
b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang Komisi Yudisial;
c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepatuhan Internal seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;

d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga;
f. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan proses rekrutmen penghubung, hubungan antar lembaga;
g. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan perencanaan, perancangan peraturan/keputusan, pengorganisasian lembaga;
h. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan analisis lembaga peradilan, hakim, pengelolaan jaringan website dan media sosial;
i. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan seleksi calon hakim agung, hakim ad hoc, pelaksanaan advokasi, peningkatan kapasitas hakim; dan
j. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan surat tembusan.

Pasal 12

Arsip dinamis Komisi Yudisial yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Komisi Yudisial yang meliputi:

a. Arsip dinamis yang tercipta di Biro Pengawasan Perilaku Hakim meliputi penanganan laporan masyarakat, pemantauan persidangan, proses sidang panel, pleno, majelis kehormatan hakim;
b. Arsip dinamis yang tercipta di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim meliputi proses calon hakim agung/hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
c. Arsip dinamis yang tercipta di Biro Investigasi meliputi pelaksanaan investigasi, laporan informan;
d. Arsip dinamis yang tercipta di Bagian Perencanaan dan Kepatuhan Internal meliputi pemeriksaan terhadap

pelanggaran disiplin pegawai, audit keuangan internal dan eksternal, audit barang dan jasa, pendampingan/bantuan hukum;

e. Arsip dinamis yang tercipta di Biro Umum meliputi sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, daftar arsip terjaga, pengelolaan perbendaharaan dan lain-lain; dan
f. Arsip dinamis yang tercipta di Pusat Analisis dan Layanan Informasi meliputi cetak biru IT, *roadmap* IT, sistem manajemen keamanan informasi dan jaringan.

Pasal 13

Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional secara substansi kearsipan dan/atau dalam dedikasi dan integritas dalam mengelola arsip serta ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 14

(1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Dinamis pada setiap Unit Pengolah di Komisi Yudisial.
(2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak Akses Arsip.
(3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di Unit Pengolah.

Pasal 15

Tabel pengguna yang memiliki akses, pengamanan atau penyimpanan, prosedur pengirimaan atau penyampaian informasi Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 16

Tabel Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IV

PENGGUNA YANG BERHAK MENGAKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 17

(1) Pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial, terdiri atas:
   a. pengguna kebijakan;
   b. pelaksana kebijakan; dan
   c. pengawas internal.
(2) Pengguna kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
   b. Pejabat Eselon I di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
   c. Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
(3) Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki hak akses terhadap seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Eselon I di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki hak akses terhadap seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.
(5) Pejabat Eselon I di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki hak akses terhadap informasi yang merupakan kewenangan dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial serta Pejabat yang setingkat dengan unit kerja Eselon I di luar unit kerjanya,

kecuali telah mendapat izin dan persetujuan tertulis dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial.

(6) Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki hak akses terhadap seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.

(7) Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki hak akses terhadap informasi yang merupakan kewenangan dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Eselon I Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, serta Pejabat yang setingkat dengan unit kerja Eselon II di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapat izin dan persetujuan tertulis dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, serta Pejabat Eselon I di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 18

(1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. pejabat setingkat Eselon III di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
   b. pejabat setingkat Eselon IV/Subkoordinator di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

(2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak akses untuk seluruh Arsip dengan tingkat klasifikasi biasa yang berada di bawah kewenangannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak akses terhadap Arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, dan rahasia yang merupakan kewenangan dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Eselon I, Eselon II Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, serta Pejabat yang setingkat dengan unit kerja Eselon III dan Eselon IV/Subkoordinator di luar unit kerjanya.

Pasal 19

(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di Komisi Yudisial.
(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di Komisi Yudisial guna melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis di luar Komisi Yudisial, yaitu:

a. publik memiliki hak akses untuk seluruh Arsip dengan kategori Arsip Biasa/Umum/Terbuka yang diajukan permohonan informasi kepada PPID;
b. pengawas eksternal memiliki hak akses seluruh Arsip di Komisi Yudisial guna melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP); dan
c. aparat penegak hukum memiliki hak akses Arsip di Komisi Yudisial yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani guna melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIE SUDIHAR

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL

PENGGUNA YANG BERHAK UNTUK MENGAKSES ARSIP DINAMIS DAN PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Tabel Pengguna yang berhak akses arsip dinamis

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses	Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal/ Eksternal	Publik	Penegak Hukum
1.	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√
2.	Terbatas	√	-	√	-	√
3.	Rahasia	√	-	√	-	√

Tabel Pengamanan atau Penyimpanan Arsip Dinamis sesuai dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1.	Biasa/Umum/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	*Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan	Diperlukan Tempat penyimpanan yang aman	1. *Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/*password* atau ID digital) 2. Penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual	1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan *Operating System* khusus atau aplikasi khusus

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
			eksternal serta penegak hukum		penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal		3. *Firewall* dan sistem- sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi
3.	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur Rahasia Dengan Memberikan Cap "RAHASIA" pada fisik Arsip 2. Tidak Sembarangan	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	1. *Back-up* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	1. Hanya staf yang ditunjuk oleh lembaga atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut 2. Autentikasi pengguna (nama penggun/*password* atau ID digital)	1. Langkah-langkah keamanan dengan *Operating System* khusus atau aplikasi khusus 2. *Firewall* serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
		meletakkan arsip/dokumen yang bersifat rahasia				3. Penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual	3. *Firewall* adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan

Catatan:

Ketentuan tentang back up pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan ketentuan rahasia dan terbatas. Ketentuan tentang back up pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas dengan metode back up yang sesuai dengan tingkatan klasifikasi keamanan.

Tabel Prosedur Pengiriman atau Penyampaian Informasi

NO.	TINGKAT/ DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa/Umum/Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, *password,* dan lain-lain.
3.	Rahasia	1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 3. Menggunakan amplop Dobel 4. Amplop segel, stempel rahasia. 5. Konfirmasi tanda terima 6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia	1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia 3. Menggunakan persandian atau kriptografi.

Catatan:

Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas.

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIE SUDIHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
ARSIP DINAMIS DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI
YUDISIAL

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	LM	LAPORAN MASYARAKAT				
	LM.01	PENERIMAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan informasi penerimaan dan perkembangan laporan masyarakat naskah yang dikeluarkan:				
		1) laporan layanan/konsultasi umum	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		2) laporan layanan/konsultasi perkembangan penanganan Laporan Masyarakat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		3) formulir pemberitahuan informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat dan surat pemberitahuan jawaban atas permohonan audiensi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		4) laporan rekapitulasi data laporan masyarakat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		5) surat jawaban atas komplain penanganan laporan masyarakat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LM.02	VERIFIKASI KELENGKAPAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan dan tembusan yang memerlukan tindak lanjut penanganan berupa verifikasi atas kelengkapan laporan masyarakat, meliputi:				
		1. Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan pendahuluan verifikasi persyaratan laporan, yaitu:	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Verifikasi dan Anotasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		a. Hasil/resume verifikasi laporan; b. Surat permintaan kelengkapan data dan/atau bukti pendukung kepada Pelapor; c. Kelengkapan data dan/atau bukti pendukungnya laporan;				
		2. Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan verifikasi lanjutan berupa Nota Dinas untuk meneruskan ke Biro Investigasi untuk dilakukan pendalaman Laporan Masyarakat.				
		3. Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan verifikasi langsung/lapangan, yaitu:				
		a. Laporan Penyelenggaraan Bedah Laporan; b. Rencana Kegiatan; c. Surat Perintah; d. Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan kepada Pelapor; e. Surat Permintaan Data kepada Pengadilan/instansi terkait; f. Surat Pernyataan Pengambilan Keterangan dari Pihak-Pihak terkait; g. Laporan Hasil Verifikasi Langsung/Lapangan; h. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Langsung/Lapangan)				
	LM.03	VERIFIKASI NON KELENGKAPAN				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan masyarakat berupa verifikasi non kelengkapan laporan masyarakat, naskah yang dikeluarkan: 1. Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa laporan tidak berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial; 2. Surat meneruskan laporan masyarakat kepada lembaga/instansi berwenang; 3. Surat pemberitahuan pelapor laporannya lewat waktu karena tidak dipenuhinya permintaan kelengkapan data dan/atau bukti pendukung; 4. Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH; 5. Nota Dinas meneruskan Laporan Masyarakat kepada Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Verifikasi dan Anotasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim
	LM.04	REGISTRASI LAPORAN MASYARAKAT				
	LM.04.01	PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan awal dan penanganan lanjutan laporan masyarakat yang sudah mendapatkan nomor registrasi, meliputi:				
		a. Penerimaan Berkas Register Aktif	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		1) Berkas Laporan Masyarakat 2) Lembar Penetapan Penanggungjawab Berkas Register Aktif 3) Anotasi Laporan Masyarakat (Analisis) 4) Lembar Kartu Kendali Waktu Berkas Register Aktif				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Gelar Laporan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		1) Undangan Pelaksanaan Gelar Laporan kepada Peserta dan/atau Narasumber Ahli 2) Lembar Daftar Hadir Peserta Gelar laporan 3) Laporan Kegiatan Gelar Laporan dan lampirannya 4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dalam rangka penggunaan anggaran Kegiatan Gelar laporan dan lampirannya				
		5) Term of Reference Materi Substansi Gelar Laporan untuk Narasumber Ahli 6) Berita Acara Gelar Laporan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		c. Pemeriksaan/Klarifikasi				
		1) Rencana Kegiatan (Rengiat) Pemeriksaan dan lembar persetujuannya	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		2) Surat Panggilan Pemeriksaan kepada Terperiksa (Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		3) Surat permintaan bantuan penugasan dan/atau penyediaan fasilitas ruangan dalam rangka pemeriksaan kepada atasan Terperiksa	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Surat Perintah penugasan melaksanakan kegiatan pemeriksaan untuk Tim Pemeriksa (Petugas Pelaksana, Tenaga Ahli, dan/atau Komisioner)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		5) Bahan Pemeriksaan (Resume Laporan Masyarakat dan Daftar Pertanyaannya)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		6) Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		7) Lembar Daftar Hadir Kegiatan Pemeriksaan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		8) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan lampirannya	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		9) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dalam rangka penggunaan anggaran Kegiatan Pemeriksaan dan lampirannya	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		10) Surat Permintaan Klarifikasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		11) Surat Permohonan Bantuan penugasan menjawab permintaan klarifikasi kepada atasan Terperiksa	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		12) Rencana Kegiatan (Rengiat) pertemuan Permintaan Data/Informasi dan lembar persetujuannya	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		13) Surat Permintaan Data dan/atau informasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		14) Surat Permohonan Bantuan penugasan menjawab permintaan Data kepada atasan Terperiksa	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		15) Berita Acara Notulensi Pertemuan Permintaan Data/Informasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		16) Lembar Daftar Hadir Kegiatan Pertemuan Permintaan Data/Informasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		17) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Permintaan Data/Informasi dan lampirannya	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		18) Berita Acara Resume Permintaan dan/atau penerimaan Data/Informasi dari Pelapor melalui media telekomunikasi (audio/audio visual)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		d. Hasil Penanganan Laporan Masyarakat				
		1) Laporan Pemeriksaan Pendahuluan (LPP)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		2) Lembar konfirmasi cheklist kelengkapan berkas siap daftar Sidang Panel untuk disetujui oleh Subbagian Pemeriksaan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		3) Lembar Pendaftaran Sidang Panel	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		4) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		5) Lembar konfirmasi cheklist kelengkapan berkas siap daftar Sidang Pleno untuk disetujui oleh Subbagian Pemeriksaan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		6) Lembar Pendaftaran Sidang Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Monitoring Hasil Penanganan Laporan Masyarakat Rekapitulasi Meta Data Hasil Penanganan Berkas Register Aktif Manual (Monitoring berkas)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemeriksaan I dan II Biro Pengawasan Perilaku Hakim
	LM.04.02	PERSIDANGAN				
		a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sidang Panel:	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		1. Penetapan Sidang; 2. Berita Acara Sidang atau Berita Acara Pembatalan Sidang; 3. Daftar Hadir; 4. Pengesahan Sidang Panel Laporan Pemeriksaan Pendahuluan; 5. Rekaman Sidang Panel; 6. Laporan Pelaksanaan Sidang Panel.				
		b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sidang Pleno:	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		1. Penetapan Sidang; 2. Berita Acara Sidang atau Berita Acara Pembatalan Sidang; 3. Daftar Hadir; 4. Pengesahan/Kutipan Berita Acara Sidang; 5. Putusan Sidang Pleno dan Petikan Putusan Sidang Pleno; 6. Rekaman Sidang Pleno, Laporan Pelaksanaan Sidang Pleno				
		c. Surat pemberitahuan kepada Pelapor/Kuasa Pelapor dan Terlapor perihal Laporan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Naskah yang dikeluarkan secara terbatas terhadap Laporan yang tidak terbukti berupa surat pemberitahuan putusan sidang pleno disertai petikan kepada Pelapor/Kuasa Pelapor, dan Terlapor disertai dengan petikan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
	LM.05	REKOMENDASI SANKSI DAN MKH Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekomendasi sanksi dan pelaksanaan persidangan Majelis Kehormatan Hakim, meliputi:				
		a. Surat usul penjatuhan sanksi dan/atau pelaksanaan persidangan MKH kepada Mahkamah Agung disertai dengan Salinan Putusan Sidang Pleno; b. Surat pemberitahuan dan Petikan Putusan Sidang Pleno kepada Pelapor/Kuasa Pelapor; c. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim: 1. Penunjukan Anggota MKH dan Penetapan Hari Sidang; 2. Berita Acara Sidang MKH; 3. Putusan Sidang MKH; 4. Rekaman Sidang MKH; 5. Daftar Hadir; 6. Surat Kuasa/Penugasan Pendamping Terlapor; 7. Surat Panggilan kepada Terlapor dan/atau saksi; 8. Laporan Pelaksanaan Sidang MKH.	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
2	PM	PEMANTAUAN				
	PM.01	PEMANTAUAN LAPORAN MASYARAKAT Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan masyarakat terkait dengan permohonan pemantauan dan pelaksanaan pemantauan persidangan di pengadilan, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Laporan analisis terhadap permohonan pemantauan yang diajukan oleh masyarakat untuk dimohonkan persetujuan dari Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi sebagai dasar dilakukannya pemantauan; b. Disposisi/perintah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi terkait permohonan pemantauan; c. Surat pemberitahuan tidak dapat dilakukan pemantauan kepada Pelapor; d. Surat pemberitahuan pemantauan kepada Pimpinan Pengadilan/Mahkamah Agung; e. Laporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi untuk memperoleh persetujuan terhadap surat pemberitahuan atas hasil pemantauan yang telah dilakukan;	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Pemantauan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
	PM.02	ADMINISTRASI PEMANTAUAN				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan percepatan penanganan laporan masyarakat terkait dengan permohonan pemantauan dan pelaksanaan pemantauan persidangan di pengadilan.	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara dibidang hukum dan data pengawasan perilaku hakim	Subbagian Pemantauan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
3	AL	ADMINISTRASI PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan percepatan penanganan laporan masyarakat, yaitu: 1) naskah-naskah terkait dengan pelaksanaan percepatan penyelesaian berkas: 2) percepatan pengolahan data laporan; 3) validasi data penanganan laporan masyarakat; 4) pengolahan data konsultasi dan informasi perkembangan laporan masyarakat; 5) pelaksanaan verifikasi; 6) pemetaan hasil verifikasi; 7) penyusunan analisis; 8) penyusunan LHP/LPP; 9) pengolahan data sidang Panel/Pleno/MKH; 10) pemetaan hasil persidangan; 11) penyusunan bahan Sidang Pleno.	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan data pengawasan perilaku hakim	1) Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2) Bagian Pemeriksaan dan Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim
4	TM	TEMBUSAN				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan tembusan yang tidak memerlukan tindak lanjut penanganan.	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Penerimaan Laporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim
5	RH	REKRUTMEN HAKIM				
	RH.01	ADMINISTRASI SELEKSI CALON HAKIM AGUNG (SCHA)				
	RH.01.01	PERSIAPAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan/pra seleksi calon hakim agung (penjaringan dan penerimaan usulan				
		a. Naskah Soal Seleksi Kualitas	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Naskah terkait nama Tim Pakar Seleksi Calon hakim Agung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Kalender Seleksi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang H88 seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Jadwal Seleksi Tentatif	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Surat peminjaman Gedung/Ruangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		e. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pleno Penetapan Pelaksanaan Seleksi, meliputi:				
		1. Undangan Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3. Daftar Hadir Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4. Notula Rapat Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5. Rekaman pelaksanaan Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Naskah-naskah yang berkaitan Pemuatan iklan/ pengumuman seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.02	TAHAP ADMINISTRASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tahap administrasi pada proses seleksi calon hakim agung, meliputi:				
		a. Tanda Terima Berkas Pendaftaran b. Daftar Riwayat Hidup c. Naskah-naskah terkait LHKPN d. Naskah-naskah Pendaftaran e. Naskah-naskah Pengusulan CHA (Masyarakat, Pemerintah, MA) f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Calon g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja Calon	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		h. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pleno Penetapan Pelaksanaan Seleksi, meliputi:				
		1. Undangan Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3. Daftar Hadir Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4. Notula Rapat Pleno	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5. Rekaman pelaksanaan Pleno	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		i. Keputusan Ketua Komisi Yudisial terkait Penetapan Kelulusan Seleksi Administrasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		j. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.03	TAHAP KUALITAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tahap kualitas pada proses seleksi calon hakim agung, meliputi:				
		a. Print Out Hasil Ujian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Soal Ujian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c.Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Seleksi Kualitas:				
		1. Berita Acara Pembukaan Soal Seleksi Kualitas	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Kualitas	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kualitas	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Hasil Penilaian (Komisioner, Pakar)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		e. Rekapitulasi Nilai Akhir	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pleno Penetapan Pelaksanaan Seleksi Kualitas, meliputi:	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		1. Undangan Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3. Daftar Hadir Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4. Notula Rapat Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5. Rekaman pelaksanaan Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		g.Keputusan Ketua Komisi Yudisial terkait Penetapan Kelulusan Seleksi Kualitas	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		h. Pengumuman Hasil Seleksi Kualitas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		i. Laporan Hasil Seleksi Kualitas	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.04	TES KEPRIBADIAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tes kepribadian serta klarifikasi pada proses seleksi calon hakim agung,				
		a. Profile Assessment	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Laporan Bahan Klarifikasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Laporan Hasil Klarifikasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.05	PEMERIKSAAN KESEHATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan pada proses seleksi calon hakim agung, yang meliputi:				
		1) Prosedur Tetap Proses Pemeriksaan Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2)Jadwal Pelaksanaan Tes Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3) Berita Acara Rapat Pleno Pemeriksaan Kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4) Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5) Rekaman Rapat Pleno Pemeriksaan Kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.06	WAWANCARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan wawancara pada proses seleksi calon hakim agung, yang meliputi:				
		1) Jadwal wawancara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Bahan Wawancara untuk Panel Tamu	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3) Bahan Wawancara untuk Komisioner	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4) Lembar Nilai Wawancara	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5) Pakta Integritas yang dibaca dan ditandatangani oleh Peserta Wawancara CHA	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		6)Tata Tertib Wawancara Terbuka	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		7) Berita Acara Rapat Pleno Kelulusan Wawancara	Terbatas	Eselon II	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		8) Bahan Pleno Keulusan Akhir	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		9) Berita Acara Rapat Pleno Kelulusan Akhir	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		10) Pengumuman Kelulusan Akhir setelah Komisi Yudisial menyerahkan usulan CHA kepada DPR	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.07	PENYERAHAN CHA KE DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan calon hakim agung kepada Komisi III DPR RI, meliputi:				
		a. Profil calon hakim agung yang telah diseleksi oleh Komisi Yudisial	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Laporan Pelaksanaan Seleksi CHA	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Surat Penyerahan Usulan CHA ke DPR	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Bahan SCHA yang diminta oleh DPR	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.01.08	PENUNJANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjang seleksi calon hakim agung termasuk kegiatan pemantauan fit and proper test dan lain sebagainya, meliputi:				
		1) Jadwal Pemantauan fit and proper test	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2) Laporan pemantauan individu peserta CHA fit and proper test	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3) Laporan Hasil fit and proper test	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.02	DATABASE CALON HAKIM AGUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan database calon hakim agung, meliputi:				
		1) Data CHA yang potensial	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2) Korespondesi kepada instansi terkait	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Nota Dinas kepada unit kerja di Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.03	PEMETAAN DAN PENJARINGAN CALON HAKIM AGUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan dan penjaringan calon hakim agung mulai dari persiapan sampai hasil penjaringan.	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04	ADMINISTRASI SELEKSI HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG				
	RH.04.01	PERSIAPAN SELEKSI HAKIM AD HOC Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan/pra seleksi calon Hakim Ad Hoc, meliputi penjaringan dan penerimaan usulan calon Hakim Ad Hoc, meliputi:				
		a. Naskah Soal Seleksi Kualitas	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Naskah terkait nama Tim Pakar Seleksi Calon hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Kalender Seleksi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Jadwal Seleksi Tentatif	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		e. Surat peminjaman Gedung/Ruangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah AgungBiro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pleno Penetapan Pelaksanaan Seleksi, meliputi:				
		1. Undangan Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pleno	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3. Daftar Hadir Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4. Notula Rapat Pleno	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5. Rekaman pelaksanaan Pleno	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		g. Naskah-naskah yang berkaitan Pemuatan iklan/ pengumuman seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		h. surat permohonan pengusulan calon hakim ad hoc	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.02	TAHAP ADMINISTRASI SELEKSI HAKIM AD HOC Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tahap administrasi pada proses seleksi calon Hakim Ad Hoc, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Tanda Terima Berkas Pendaftaran b. Daftar Riwayat Hidup c. Naskah-naskah terkait LHKPN d. Naskah-naskah Pendaftaran e. Naskah-naskah Pengusulan CH Ad hoc di MA f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Calon g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja Calon h. Berita Acara Pleno Penetapan Kelulusan Seleksi Administrasi i. Keputusan Ketua Komisi Yudisial terkait Penetapan Kelulusan Seleksi Administrasi j. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.03	TAHAP KUALITAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tahap kualitas pada proses seleksi calon Hakim Ad Hoc, meliputi:				
		a. Print Out Hasil Ujian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Soal Ujian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c.Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Seleksi Kualitas:				
		1. Berita Acara Pembukaan Soal Seleksi Kualitas	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Kualitas	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kualitas	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Hasil Penilaian (Komisioner, Pakar)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		e. Rekapitulasi Nilai Akhir	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		f. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pleno Penetapan Pelaksanaan Seleksi Kualitas, meliputi:				
		1. Undangan Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		2. Berita Acara Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		3. Daftar Hadir Rapat Pleno	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		4. Notula Rapat Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		5. Rekaman pelaksanaan Pleno	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g.Keputusan Ketua Komisi Yudisial terkait Penetapan Kelulusan Seleksi Kualitas	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		h. Pengumuman Hasil Seleksi Kualitas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		i. Laporan Hasil Seleksi Kualitas	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.04	TES KEPRIBADIAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tes kepribadian serta proses klarifikasi pada proses seleksi calon Hakim Ad Hoc, meliputi:				
		a. Profile Assessment	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Laporan Bahan Klarifikasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Laporan Hasil Klarifikasi	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.05	PEMERIKSAAN KESEHATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan pada proses seleksi calon Hakim Ad Hoc, meliputi:				
		a. Prosedur Tetap Proses Pemeriksaan Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Jadwal Pelaksanaan Tes Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Berita Acara Rapat Pleno Pemeriksaan Kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		e. Rekaman Rapat Pleno Pemeriksaan Kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.06	WAWANCARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan wawancara pada proses seleksi calon Hakim Ad Hoc, meliputi:				
		a. Jadwal wawancara	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Bahan Wawancara untuk Panel Tamu	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Bahan Wawancara untuk Komisioner	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Lembar Nilai Wawancara	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Pakta Integritas yang dibaca dan ditandatangani oleh Peserta Wawancara CH Ad Hoc	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		f. Tata Tertib Wawancara Terbuka	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		g. Berita Acara Rapat Pleno Kelulusan Wawancara	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		h. Bahan Pleno Keulusan Akhir	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		i. Berita Acara Rapat Pleno Kelulusan Akhir	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		j. Pengumuman Kelulusan Akhir setelah Komisi Yudisial menyerahkan usulan CH Ad Hoc kepada DPR	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.07	PENYERAHAN CALON HAKIM AD HOC KE DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan calon Hakim Ad Hoc kepada Komisi III DPR RI, meliputi:				
		a. Profil calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang telah diseleksi oleh Komisi Yudisial	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Laporan Pelaksanaan Seleksi CH Ad Hoc di Mahkamah Agung	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Surat Penyerahan Usulan CH Ad Hoc di Mahkamah Agung ke DPR	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Bahan SCH Ad Hoc di Mahkamah Agung yang diminta oleh DPR	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan seleksi calon ad hoc Hakim Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.04.08	PENUNJANG SELEKSI HAKIM AD HOC Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjang seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung termasuk kegiatan pemantauan fit and proper test dan lain sebagainya, meliputi:				
		a. Jadwal Pemantauan fit and proper test	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Laporan pemantauan individu peserta CH Ad Hoc di Mahkamah Agung fit and proper test	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Laporan Hasil fit and proper test	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d. Laporan Audiensi dengan stakeholderterkait seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.05	DATABASE CALON HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan database calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Data calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang potensial	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Korespondesi kepada instansi terkait	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		c. Nota Dinas kepada unit kerja di Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	RH.06	PEMETAAN DAN PENJARINGAN BAKAL CALON HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG YANG POTENSIAL Naskah-naskah yang berkaitan dengam kegiatan pemetaan dan penjaringan calon hakim ad hoc di MA yang potensial	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang seleksi calon Ad Hoc di Mahkamah Agung	Subbagian Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
6	AH	ADVOKASI HAKIM				
	AH.01	Pelaksanaan Advokasi				
	AH.01.01	ADVOKASI REPRESIF Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi represif yang meliputi penelusuran informasi terkait pemantauan media dan lain lain, meliputi:				
		a. Laporan hasil penelahaan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Advokasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. Lembar Persetujuan Penanganan Kasus yang ditandatangani oleh Kepala Biro dan Ketua Bidang SDM, Hukum, dan Penelitian dan Pengembangan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Advokasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Laporan Hasil Penanganan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Advokasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		d Lembar Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Penanganan yang ditandatangani oleh Kepala Biro dan Ketua Bidang SDM, Hukum, dan Penelitian dan Pengembangan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Advokasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		e. Korespondensi kepada institusi pengadilan, kepolisian terkait, Terlapor	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Advokasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	AH.01.02	ADVOKASI PREVENTIF Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi Preventif yang meliputi kegiatan sinergitas (diskusi publik) dan klinik etik (kajian, laboratorium, pengabdian masyarakat bagi mahasiswa fakultas hukum di universitas mitra klinik etik), dan lain lain.	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Advokasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
7	KH	KAPASITAS HAKIM				
	KH.01	PELATIHAN HAKIM				
	KH.01.01	KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan KEPPH bagi hakim dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha, baik pelatihan secara tatap muka maupun online	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KH.01.02	TEMATIK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan tematik bagi hakim dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha, baik pelatihan secara tatap muka maupun online	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	KH.01.03	JARAK JAUH Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan KEPPH dan Tematik bagi Hakim melalui materi digital	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	KH.02	PENUNJANG PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjang peningkatan kapasitas hakim, pengembangan instrumen dan pelaksanaan penilaian dan/atau dampak keberhasilan PKH	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang upaya peningkatan kapasitas hakim	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
	KH.03	FORUM HAKIM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum diskusi hakim berupa diskusi, FGD, seminar non pelatihan/workshop dan/atau jejak pendapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
8	SH	KESEJAHTERAAN HAKIM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan hakim, meliputi:				
		a. bahan/data terkait upaya peningkatan kesejahteraan hakim	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang upaya peningkatan kesejahteraan hakim	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
		b. rekomendasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan hakim kepada stakeholder	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim	Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
9	IV	INVESTIGASI				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	IV.01	ATENSI Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh investigator terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, meliputi:				
		a. Laporan Informasi Khusus	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi
		b. Berita Acara Pra Ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		c. Berita Acara Ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		d. Laporan Atensi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		e. Nota Dinas kepada Ketua Bidang Pengawas Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		f. Lembar Disposisi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Surat Perintah Pelaksanaan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi
		h. Lembar UUK (Unsur-Unsur Utama Keterangan)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi
		i. Dokumen Perencanaan Tugas (Rengas)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi
		j. Laporan Penugasan (Lapgas)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi
		k. Surat Permintaan Data dan/atau Informasi yang ditujukan kepada Lembaga lain terkait KEPPH	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Rekam Jejak Biro Investigasi
		l. Laporan Hasil Investigasi (LI)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		m. Nota Dinas Kepala Biro Investigasi ke Kepala Biro Pengawasan Hakim (jika laporan investigasi ditindaklanjuti)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		n. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pra ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		m. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
	IV.02	PENELAAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh investigator/Komisi Yudisial berdasarkan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, meliputi:				
		a. Berita Acara Pra Ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		b. Berita Acara Ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		c. Laporan Penelaahan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		d. Nota Dinas kepada Ketua Bidang Pengawas Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Lembar Disposisi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		f. Surat Perintah Pelaksanaan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		g. Lembar UUK (Unsur-Unsur Utama Keterangan)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		h. Dokumen Perencanaan Tugas (Rengas)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		i. Laporan Penugasan (Lapgas)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		j. Surat Permintaan Data dan/atau Informasi yang ditujukan kepada Lembaga lain terkait KEPPH	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		k. Laporan Hasil Investigasi (LI)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		l. Nota Dinas Kepala Biro Investigasi ke Kepala Biro Pengawasan Hakim (jika laporan investigasi ditindaklanjuti)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
		m. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pra ekspose dan ekspose	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Subbagian Analisis Informasi Investigasi Biro Investigasi
10	RE	REKAM JEJAK				
	RE.01	CALON HAKIM AGUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil penyelusuran rekam jejak Calon Hakim Agung, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		b. Naskah-naskah berkaitan dengan bahan/data PRJ CHA	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		c. Rancangan SK Tim Investigasi CHA	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		d. Petikan SK Tim Investigasi CHA	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Surat Permintaan Data dan/atau Informasi yg ditujukan kepada Lembaga lain terkait Rekam Jejak CHA (PA, PT, PN, PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Universitas dll)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		f. Surat Perintah Pelaksanaan Investigasi Rekam Jejak CHA	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		g. Laporan PRJ CHA	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		h. Resume Laporan PRJ CHA	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		i. Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan rapat PRJ CHA	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
	RE.02	HAKIM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil penelurusan rekam jejak hakim, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Naskah-naskah berkaitan dengan bahan/data PRJ hakim	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		c. Rancangan SK Tim Investigasi hakim	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		d. Petikan SK Tim Investigasi hakim	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		e. Surat Permintaan Data dan/atau Informasi yg ditujukan kepada Lembaga lain terkait Rekam Jejak hakim (PA, PT, PN, PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Universitas dll)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		f. Surat Perintah Pelaksanaan Investigasi Rekam Jejak hakim	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		g. Laporan PRJ hakim	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		h. Resume Laporan PRJ hakim	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		i. Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan rapat PRJ hakim	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
	RE.03	CALON HAKIM AD HOC Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil penyelurusan rekam jejak Calon Hakim Ad hoc, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		b. Naskah-naskah berkaitan dengan bahan/data PRJ Calon Hakim Ad Hoc	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		c. Rancangan SK Tim Investigasi Calon Hakim Ad Hoc	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		d. Petikan SK Tim Investigasi Calon Hakim Ad Hoc	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		e. Surat Permintaan Data dan/atau Informasi yg ditujukan kepada Lembaga lain terkait Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc (PA, PT, PN, PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Universitas dll)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Surat Perintah Pelaksanaan Investigasi Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		g. Laporan PRJ Calon Hakim Ad Hoc	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		h. Resume Laporan PRJ Calon Hakim Ad Hoc	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang hukum dan penegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		i. Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan rapat PRJ Calon Hakim Ad Hoc -	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
11	PI	PENGELOLAAN INFORMAN				
	PI.01	PENGEMBANGAN INFORMAN INVESTIGASI Naskah - naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan informan yang meliputi pemetaan informan, rekrutmen informan, serta pengembangan kualitas dan pembinaan informan, meliputi:				
		a. Laporan Pemetaan Informan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Umum/Terbuka/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Laporan Rekrutmen Informan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		c. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kualitas informan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		d. Laporan Pembinaan Informan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		e. Matriks Laporan Monitoring dan Evaluasi Informan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi
		f. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen dan pembinaan informan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Biro Investigasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	KP	KEPEGAWAIAN				
	KP.01	FORMASI PEGAWAI Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana persiapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi, meliputi:				Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan bezzeting/persediaan pegawai	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan dan Persetujuan atas Permintaan Formasi kepada Menpan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat usulan rincian formasi ke Menpan RB	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.02	PENGADAAN PEGAWAI				
	KP.02.01	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan CPNS mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes, sampai dengan dikeluarkannya SK CPNS, meliputi:				
		a. Pengumuman Formasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Seleksi Administrasi, yaitu naskah-naskah yang berkaitan dengan Seleksi Administrasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan CPNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Seleksi Kompetensi Dasar: 1) Pengumuman Pemanggilan Peserta Tes 2) Pengumuman/Keputusan Seleksi Kompetensi Dasar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Seleksi Kemampuan Bidang: 1) Pengumuman Pemanggilan Peserta Tes 2) Pengumuman/Keputusan Seleksi Kompetensi Bidang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Hasil Tes Kesehatan CPNS	Rahasia	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data CPNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Penetapan Pengumuman Kelulusan CPNS	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Naskah-naskah yang berkaitan dengan lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan CPNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		h. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP CPNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan CPNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		i. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan CPNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		j. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS/PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan CPNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.02.02	PEJABAT STRUKTURAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai khususnya Pejabat Struktural mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes, sampai dengan pengumuman penerimaan, meliputi:				
		a. Rancangan Keputusan Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penerimaan pejabat struktural	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Pengumuman Pengisian Jabatan Struktural	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Wawancara, dan/atau Kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pejabat struktural	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelusuran rekam jejak pejabat struktural	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pejabat struktural	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Pengumuman Kelulusan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		g. Keputusan Pengangkatan Pejabat Struktural	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang penerimaan pejabat struktural	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.02.03	NON PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Tenaga Ahli, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan serta Staf Khusus, yang meliputi:				
		a. Pengumuman Formasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Seleksi Administrasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan Non PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pengumuman Pemanggilan Peserta Tes	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Hasil Pelaksanaan Ujian	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan Non PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Pengumuman Kelululusan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Keputusan Pengangkatan Non PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengadaan Non PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.03	PENGANGKATAN				
	KP.03.01	PENGANGKATAN PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan PNS termasuk di dalamnya hasil pemeriksaan kesehatan, kelulusan diklat prajabatan sampai dengan pelantikan, yang meliputi:				
		a. Berita Acara Pelantikan PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. SK Pengangkatan PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.03.02	PENGANGKATAN JABATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan, meliputi:				
		a. Rancangan SK Pengangkatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan jabatan strukturan dan fungsional	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Berita Acara Pelantikan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan jabatan strukturan dan fungsional	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat Pernyataan Pelantikan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan jabatan strukturan dan fungsional	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat Perintah melaksanakan tugas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan jabatan strukturan dan fungsional	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Surat Perintah menduduki jabatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan jabatan strukturan dan fungsional	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Pakta Integritas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.03.03	PENGANGKATAN NON PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan/pengangkatan kembali Non PNS di lingkungan Komisi Yudisial (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan/Anggota KY, Tenaga Perbantuan Dokter), meliputi:				
		a. Rancangan SK Pengangkatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan Non PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Risalah Hasil Rapat Evaluasi Kinerja Non PNS	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan Non PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Kontrak Kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di bidang pengangkatan Non PNS	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.01	BERKAS BAPERJAKAT Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja, yang meliputi:				
		a. Undangan Rapat	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Berita Acara	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Laporan Hasil Beperjakat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.02	KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan pegawai, meliputi:				Biro Umum
		a. Surat Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kenaikan pangkat/golongan pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b.Rancangan SK dan Petikan SK Kenaikan Pangkat/Golongan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kenaikan pangkat/golongan pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.03	KENAIKAN GAJI BERKALA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai, meliputi:				
		a. Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam kenaikan gaji pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam kenaikan gaji pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.04	PENYESUAIAN MASA KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji, meliputi:				
		a. Surat Pengajuan terkait perhitungan masa kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penyesuaian ruang gaji	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b.Rancangan SK Penyesuaian Masa Kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penyesuaian ruang gaji	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.05	PENYESUAIAN TUNJANGAN KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyesuaian tunjangan keluarga, meliputi Formulir KP4	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penyesuaian tunjangan keluarga	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.06	ROTASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas, meliputi rancangan SK Rotasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan rotasi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.04.07	ALIH TUGAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan, meliputi:				
		a. Surat Persetujuan Pindah	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam alih tugas	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Pernyataan tidak dijatuhi hukuman disiplin dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar/ikatan dinas	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam alih tugas	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat Usulan Alih Status Pegawai	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam alih tugas	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.05	PENDELEGASIAN WEWENANG				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.05.01	PELAKSANA TUGAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila definitifnya belum dilantik, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penunjukan pejabat pelaksana tugas	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Risalah Rapat	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penunjukan pejabat pelaksana tugas	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat Usulan Penunjukan Plt Sekretaris Jenderal	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penunjukan pejabat pelaksana tugas	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.05.02	PELAKSANA HARIAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitf tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan), meliputi: Surat Perintah Penunjukan Plh.	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam penunjukan pejabat pelaksana harian	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.06	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				
	KP.06.01	DATA/KETERANGAN PEGAWAI Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai, meliputi:				
		DATA/KETERANGAN PEGAWAI				
		1) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		2) Rancangan SK Pengangkatan CPNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		3) Hasil Pengujian Kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		4) Rancangan SK Pengangkatan PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		5) Rancangan SK Penyesuaian Masa Kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		6) Rancangan SK Kenaikan Pangkat	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		8) Rancangan SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		9) Berita Acara Pelantikan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		10) Surat Usulan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		11) Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		12) Rancangan SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		13) Rancangan SK Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan di luar Instansi Induk	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		14) Surat Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan/Penugasan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		15) Rancangan SK Pemberhentian/Pembebasan Sementara	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		16) Rancangan SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		17) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		18) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		19) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		20) Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		21) Surat Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		22) Surat Izin Belajar Dalam/Luar Negeri	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		23) SK Penempatan Pegawai	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		24) Surat Penarikan Pegawai	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		25) Surat Usulan Pengajuan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		26) Surat Usulan Pengajuan Pensiun	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		27) Rancangan SK Pensiun	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		28) Formulir	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		29) Surat Usulan Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		30) Surat Keterangan untuk melakukan perceraian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		31) Rancangan SK Pemberian Izin Perceraian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		32) Rancangan SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		33) Rancangan SK Pemberhentian sebagai PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.06.02	KARTU PEGAWAI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai, kartu suami atau kartu istri, meliputi:				
		a. Surat Pengajuan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Isteri	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Pengajuan Pembuatan Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.06.03	SERAH TERIMA JABATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan serah terima jabatan, memori serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Madya, jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas, meliputi:				
		a. Undangan serah terima jabatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan serah terima jabatan	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan serah terima jabatan	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Formulir Memori Jabatan yang telah diisi oleh pejabat yang lama	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam pelaksanaan serah terima jabatan	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.06.04	PERIZINAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan izin mengajar (membantu suatu kegiatan diklat), izin belajar, izin yang sifatnya tidak mengganggu kedinasan sehari-hari, atau mengambil sebagian waktu jam kerja (izin di luar kedinasan), meliputi:				
		a. Surat Perintah terkait izin mengajar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Keterangan terkait izin belajar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. SK terkait tugas belajar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.07	PEMBINAAN KARIR PEGAWAI				
	KP.07.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diklat, kursus, tugas belajar yang mulai dari perencanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Permohonan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) / Sertifikat	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.07.02	PENILAIAN PEGAWAI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian prestasi kerja PNS dan Non PNS, meliputi:				
		a. Nota Dinas permohonan capaian kerja PNS	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Laporan Hasil Evaluasi Kerja Non PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat Usulan Penyampaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Lembar Penetapan Angka Kredit (PAK)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.07.03	PEMBINAAN MENTAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalamnya ceramah keagamaan, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Narasumber untuk Ceramah Keagamaan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Laporan Kegiatan Pembinaan Mental	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.07.04	HUKUMAN DISIPLIN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/penurunan pangkat/golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, meliputi:				
		a. Surat Pemanggilan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Berita Acara Pemeriksaan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Rancangan SK Hukuman Disiplin baik ringan/sedang/berat	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Daftar Hadir/Absensi Pegawai	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.07.05	PENGHARGAAN / TANDA JASA Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan/tanda jasa kepada pegawai Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat Pengajuan Permohonan Pemberian Penghargaan/Tanda Jasa	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Sertifikat Penghargaan/Tanda Jasa	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.08	KESEJAHTERAAN				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.08.01	CUTI Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara, meliputi:				
		a. Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Besar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Sakit, Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Melahirkan, Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Tahunan, Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Alasan Penting	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat Permohonan Pengajuan Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Keputusan Sekretaris Jenderal terkait Cuti di Luar tanggungan Negara (CTLN)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.08.02	KESEHATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan asuransi kesehatan pegawai, chek-up pejabat/pegawai, surat keterangan sakit, pembebasan tugas karena alasan kesehatan (cacat karena tugas), meliputi:				
		a. surat pengajuan pemeriksaan kesehatan	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. surat permohonan pembuatan anggota	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.08.03	TASPEN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Taspen, Taperum dan lain-lain, meliputi:				
		a. surat pengajuan pengurusan Taspen	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. surat pengajuan pengurusan Taperum	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.09	PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN				
	KP.09.01	PEMBERHENTIAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai negeri dengan hormat/tidak dengan hormat/atas permintaan sendiri (uang tunggu), pemberhentian karena perampingan organisasi pemerintah, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Berita Acara Pemeriksaan/Notula Rapat	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. SK Pemberhentian Pegawai Negeri	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. surat penyampaian SK pemberhentian ke BKN	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.09.02	PENSIUN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dengan hak pensiun karena mencapai usia pensiun atau permintaan sendiri, janda/duda/anak yatim, tidak cakap jasmani/rohani, karena meninggal dunia, meliputi:				
		a. Surat pengantar usul pensiun	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DCPP)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Rancangan SK Pensiun	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Surat pernyaataan tidak pernah dijatuhi disiplin tingkat sedang atau berat	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.10	PEJABAT NEGARA				
	KP.10.01	Berkas Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan data dan keterangan pejabat negara, meliputi:				
		a. Surat Keterangan terkait status pejabat negara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat pengantar pengurusan asuransi kesehatan pejabat negara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat pemberitahuan terkait akan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat usul pensiun pejabat negara	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pegawai	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.10.02	Pemilihan Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemilihan pempinan Komisi Yudisial mulai dari persiapan sampai dengan terpilihnya pimpinan Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Undangan Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Skenario Rapat Pleno	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Tata Tertib Rapat Pleno	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Berita Acara Pleno	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Notula Rapat Pleno	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		g. Rancangan SK Penetapan Ketua dan Wakil Ketua	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.10.03	Pembidangan Tugas Komisioner Naskah-naskah yang berkaitan dengan penentuan Ketua Bidang Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Undangan Rapat Pleno Penentuan Ketua Bidang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Berita Acara Pleno	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Notula Rapat Pleno	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Rancangan SK Penetapan Ketua Bidang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	KP.10.05	Pemberian Tanda Jasa Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan/tanda jasa kepada pejabat negara, meliputi:				
		a. Surat Pengajuan Permohonan Pemberian Penghargaan/Tanda Jasa	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pejabat negara	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Permohonan Rekam Jejak calon penerima penghargaan	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pejabat negara	Biro Umum
2	TU	KETATAUSAHAAN				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TU.01	ADMINISTRASI PERSURATAN				
	TU.01.01	Pengelolaan Naskah Dinas Naskah-naskah yang terkait dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, dan pencatatan, meliputi:				
		a. Rekapitulasi Naskah Dinas (Surat Masuk dan Keluar)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Buku Ekspedisi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Formulir permintaan dan layanan penggandaan dokumen/arsip	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.01.02	Pengiriman Dokumen Naskah-naskah yang terkait dengan kegiatan pengiriman dokumen atau barang meliputi berkas rekapitulasi kiriman, tanda terima (resi), invoice (bukti tagihan) serta bukti pembayaran tagihan.				
		a. Rekapitulasi Pengiriman Dokumen	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Rekapitulasi Invoice/Tagihan Pembayaran	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Lembar Resi/Tanda Terima Surat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Rekapitulasi Retur Surat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.01.03	Persuratan (ucapan terima kasih, pesan/kesan, dan undangan) Naskah-naskah yang terkait dengan ucapan terima kasih dan pesan/kesan, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. kartu ucapan terima kasih dan pesan/kesan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. surat ucapan terima kasih dan pesan/kesan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.01.04	Layanan Penelitian dan Magang Naskah-naskah yang terkait dengan kegiatan pelayanan penelitian dan magang Mahasiswa/tingkatan SMA/SMK/sederajat, meliputi:				
		a. Surat Persetujuan Penelitian/Magang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Surat Keterangan Penelitian/Magang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Foto kopi Sertifikat Magang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Formulir Internship	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Nota Dinas Permintaan Konsumsi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02	KEARSIPAN				
	TU.02.01	PEMBINAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan (apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/loka karya/workshop bimbingan teknis, supervisi dan monitoring), meliputi:				
		a. Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Bahan/materi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Surat Perintah melakukan Supervisi dan Monitoring	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Notula Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		g. Laporan Pelaksanan Pembinaan Kearsipan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02.02	PENYUSUNAN SISTEM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem arsip dinamis (Tata Naskah Dinas, pengelolaan dan pengendalian naskah dinas, Kode Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip), meliputi:				
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Undangan Narasumber	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Rancangan Usulan terkait penyusunan sistem arsip dinamis	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		g. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		h. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02.03	PENATAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan arsip di lingkungan Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Daftar Arsip Dinamis	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Nota Dinas Penunjukan Pengelola Arsip Unit Pengolah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Nota Dinas Permintaan Daftar Arsip Aktif Unit Pengolah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Arsip dan Ruang Penyimpanan (fumigasi)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02.04	PEMINDAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip, meliputi:				
		a. Jawaban Nota Dinas terkait Pemindahan Arsip	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Berita Acara Pemindahan Arsip	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02.05	PEMUSNAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip, meliputi:				
		a. Daftar Arsip yang dimusnahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Surat Keputusan Panitia Penilai Arsip yang akan dimusnahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Notula Rapat Panitia Penilaian Arsip	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Surat Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pemusnahan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan Arsip	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		g. Berita Acara Pemusnahan Arsip	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		h. Surat Menyurat dengan Pihak Terkait mengenai pelaksanaan pemusnahan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02.06	PENYERAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip, meliputi:				
		a. Daftar Arsip Statis yang diserahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Keputusan Sekretaris Jenderal Panitia Penilai Arsip yang akan diserahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		c. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip yang diserahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		d. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		e. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		f. Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		g. Berita Acara Serah Terima Arsip Statis (BAST)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		h. Keputusan Sekretaris Jenderal Penetapan Arsip Statis yang diserahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait arsip	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
	TU.02.07	LAYANAN ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman dan penggunaan arsip, meliputi:				
		a. Lembar Peminjaman/Penggunaan/Pengembalian Arsip	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
		b. Rekapitulasi Peminjaman/Penggunaan/Pengembalian Arsip	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum
3	KR	KEPROTOKOLAN				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KR.01	KUNJUNGAN KEDINASAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kenegaraan dari dalam maupun luar negeri, mengenai jemputan dan pengawalan, meliputi:				
		a. Bahan/materi pertemuan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		b. Surat Undangan dan Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		c. Daftar Peserta yang hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
	KR.02	KUNJUNGAN NON KEDINASAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kenegaraan dari dalam maupun luar negeri, mengenai jemputan dan pengawalan, meliputi:				
		a. Bahan/materi pertemuan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		b. Surat Undangan dan Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		c. Daftar Peserta yang hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
	KR.03	PELANTIKAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelantikan, meliputi:				
		a. Naskah MC dan Jadwal Acara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		b. Undangan pelantikan kepada Pimpinan dan Anggota, Sekretaris Jenderal dan Pejabat Struktural	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		c. Surat permohonan rohaniawan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
	KR.04	UPACARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan upacara kenegaraan, acara peresmian, pembukaan, penutupan suatu acara, meliputi:	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Biro Umum
		a. Naskah-naskah pelaksanaan upacara (naskah Teks Proklamasi, naskah teks Pancasila, naskah MC, naskah Doa, dll)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Nota Dinas berkaitan dengan Pelaksanaan Upacara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		c. Surat undangan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dan Management Building	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		e. Surat permohonan pelatih kepada Kepolisian (khusus persiapan latihan untuk Upacara HUT Republik Indonesia	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
	KR.05	PENGGUNAAN VIP ROOM/VIP BANDAR UDARA Naskah-naskah yang terkait dengan kegiatan yang menggunakan VIP Room/VIP Bandar Udara, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Peminjaman VIP Room/Bandar Udara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		b. Surat Permohonan terkait pengurusan kekebalan diplomatik di Kementerian Luar Negeri	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		c. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
	KR.06	ULANG TAHUN LEMBAGA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ulang tahun Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat menyurat terkait undangan ulang tahun Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		b. Daftar tamu undangan berdasarkan klasifikasi Lembaga, Kementerian, Pengadilan, Perguran Tinggi, LSM/NGO/Ormas dll	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		c. Daftar konfirmasi kehadiran tamu undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
		d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ulang Tahun Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Protokol Biro Umum
4	KU	KEUANGAN				
	KU.01	PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN				
	KU.01.01	PERBENDAHARAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Surat Keputusan terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		c. Laporan Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran	Rahasia	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pegawai	Bagian Keuangan Biro Umum
		d. Surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Rumah Tangga	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.01.02	PENATAUSAHAAN KEUANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, meliputi:				
		a. Surat Perintah Kerja (SPK)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		c. Surat Perintah Membayar (SPM)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		e. Juklak/mekanisme pengelolaan APBN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		f. Bahan yang berkaitan dengan Nota Keuangan (Rencana Penarikan Dana)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.01.03	PEMBUKUAN ANGGARAN/LPJ Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran, meliputi:				
		a. Buku Kas Umum (BKU)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Buku Pembantu Bank	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Buku Pembantu Uang Persediaan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		d. Buku Pembantu LS Bendahara	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		e. Buku Pembantu Kartu Kredit Pemerintah	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		f. Buku Pembantu Pajak	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		g. Kartu Pengawasan/laporan realisasi anggaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.01.04	KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP), meliputi:				
		a. surat pengantar pemberhentian pembayaran terkait hak-hak keuangan CPNS dan PNS	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. surat keterangan pemberhentian pembayaran terkait hak-hak keuangan CPNS dan PNS yang ditujukan kepada instansi yang baru	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.01.05	KETERANGAN PENGHASILAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterangan penghasilan perorangan, meliputi:	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Biro Umum
		a. Surat Keterangan Penghasilan (SKP)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Daftar Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai Hasil Cetak Aplikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.01.06	PENGEMBALIAN BELANJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal meliputi:				
		a. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.02	PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN				
	KU.02.01	VERIFIKASI ANGGARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran, meliputi:				
		a. Hasil Pengujian/Penelitian Kebenaran Pertanggungjawaban Pengeluaran yang tercantum dalam Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Surat-surat hasil cetak aplikasi berkaitan dengan pertanggungjawaban pengeluaran (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB), dll)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.02.02	PELAPORAN KEUANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan, meliputi:				
		a. Laporan Keuangan Semesteran (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Laporan Keuangan Triwulan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		c. Laporan Keuangan Tahunan unaudited	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		d. Laporan Keuangan Tahunan audited	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.02.03	PENERIMAAN PAJAK DAN/ATAU NON PAJAK (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran pajak, meliputi:				
		a. Surat Setoran Pajak (SSP) hasil cetak aplikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Bukti Bayar Surat Setoran Pajak (SSP) hasil cetak aplikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara hasil cetak aplikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		d. Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil cetak aplikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.03	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) meliputi:				
		a. SK tentang Penunjukan Pelaksana Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		b. Arsip data komputer/soft file	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
		c. Berita acara rekonsiliasi hasil cetak aplikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
	KU.04	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Naskah-naskah yang berkaitan laporan pertanggungjawaban keuangan baik semesteran maupun tahunan seperti: Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:				
		Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan aplikasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Bagian Keuangan Biro Umum
5	PK	PERLENGKAPAN				
	PK.01	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) dan Pelaporan				
	PK.01.01	ANALISIS KEBUTUHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran serta usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja, meliputi:				
		a. Daftar rencana kebutuhan BMN (RKBMN)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Rekapitulasi usulan kebutuhan perlengkapan/barang inventaris kantor dari Unit Kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Nota Dinas terkait reviu rencana kebutuhan BMN (RKBMN)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Surat-surat terkait penyampaian rencana kebutuhan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.01.02	PENGELOLAAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaaan, penyimpanan dan pendistribusian, opname fisik BMN disertai pembukuannya, meliputi:				
		a. Berita Acara Serah Terima Barang	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Pembukuan Barang	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Tanda Terima Penyerahan Barang	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.01.03	INVENTARISASI BARANG BERGERAK MILIK NEGARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses identifikasi, inventarisasi dan kodefikasi Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Milik Negara, meliputi:				
		a. Laporan Persediaan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Berita Acara Opname Fisik BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.01.04	REKONSILIASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekonsiliasi antara Komisi Yudisial dengan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), yaitu Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.01.05	PELAPORAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Semesteran (Unaudited & Audited) dan Laporan Tahunan (Unaudited & Audited), meliputi:				
		a. Surat Pengantar Penyampain Laporan BMN ke DJKN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Laporan BMN Semesteran unaudited	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Laporan BMN Semesteran audited	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		d. Laporan BMN Tahunan unaudited	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Laporan BMN Tahunan audited	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.02	PENGALIHAN BMN				
	PK.02.01	PEMINDAHTANGANAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan/hibah BMN dari Komisi Yudisial kepada pihak lain, meliputi:				
		a. Surat Pengajuan Pemindahtanganan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Pengumuman Lelang	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.02.02	PEMANFAATAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN Komisi Yudisial oleh pihak lain (pemanfaatan ruangan untuk sewa kantin, sewa BRI atau pinjam pakai oleh pihak lain), meliputi:				
		a. Surat Perjanjian Sewa	Rahasia	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Surat Permohonan Penilaian Sewa	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.03	PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BMN				
	PK.03.01	PENGHAPUSAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang dari pembukuan/inventaris BMN sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk Berita Acaranya, meliputi:				
		a. Rancangan SK Pembentukan Tim	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Berita Acara Penghapusan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Daftar Usul Penghapusan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		d. Daftar Barang yang dihapus	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		e. Laporan Hasil pelaksanaan penghapusan BMN termasuk di dalamnya proses lelang penghapusan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		f. Rancangan SK Penghapusan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PK.03.02	PEMUSNAHAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan/penghancuran fisik BMN, meliputi:				
		a. Rancangan SK Pembentukan Tim	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Berita Acara Pemusnahan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Daftar Usul Pemusnahan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		d. Daftar Barang yang dimusnahkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		e. Laporan Hasil pelaksanaan Pemusnahan BMN termasuk di dalamnya proses lelang penghapusan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		f. Rancangan SK Pemusnahan BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.04	MONITORING DAN PELAPORAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sensus, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN, meliputi:				
		a. Surat Pengantar Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
	PK.05	PENILAIAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kembali BMN (dalam rupiah), revaluasi BMN dan penilaian harga limit BMN, meliputi:				
		a. Berita Acara Hasil Inventarisasi/Penilaian Revaluasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Laporan Hasil Revaluasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Formulir Data Bangunan dan Tanah	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PK.06	PENGADAAN BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengadaan BMN (ATK, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Tanah/Bangunan, Kendaraan, Obat, Instalasi/Jaringan listrik air telepon LAN dari proses awal sampai dengan Berita Acara Serah Terima), meliputi:				
		a. Nota Dinas terkait pengadaan barang/jasa	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		b. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		c. Berita Acara Survei Harga Pasar	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		d. Surat Undangan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		e. Berita Acara Pembukaan Penawaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		f. Berita Acara Evaluasi Penawaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		g. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		h. Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		i. Berita Acara Hasil Pengadaan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		j. Surat Penetapan dan Penyampaian Penyedia Barang/Jasa	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		k. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		l. Berita Acara Pembayaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
		m. Kuitansi Pembayaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data BMN	Subbagian Perlengkapan Biro Umum
6	RT	RUMAH TANGGA				
	RT.01	PEMELIHARAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, rumah dinas, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/service kendaraan dinas, kebersihan dan ketertiban di lingkungan Komisi Yudisial, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pemeliharaan rumah tangga	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		b. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Kerusakan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pemeliharaan rumah tangga	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		c. Naskah-naskah berkaitan dengan pertanggungjawaban Keuangan Perbaikan Kerusakan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pemeliharaan rumah tangga	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
	RT.02	JAMUAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jamuan, meliputi:				
		a. Surat permintaan kebutuhan jamuan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		b. Surat undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		c. Naskah-naskah berkaitan dengan pertanggungjawaban Keuangan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data keuangan	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
	RT.03	PERIZINAN DAN PERMOHONAN BANTUAN/SUMBANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan izin peminjaman inventaris kantor, berupa ruangan, gedung, kendaraan dan pemberian sumbangan atau bantuan, meliputi:				
		a. Surat-surat terkait jawaban atas permohonan peminjaman inventaris kantor	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data inventaris kantor	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		b. Tanda terima peminjaman inventaris kantor	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data inventaris kantor	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
	RT.04	PENGELOLAAN KLINIK				
	RT.04.01	REKAM MEDIS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis pasien yang berobat di klinik Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Kartu Pasien	Rahasia	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data kesehatan pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		b. Buku besar pencatatan pasien	Rahasia	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data kesehatan pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Buku besar penerimaan obat	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data diri pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		d. Kartu Kendali Obat	Rahasia	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data kesehatan pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
	RT.04.02	SURAT KETERANGAN DOKTER Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan surat keterangan dokter dari pasien, meliputi:				
		a. Buku Penomoran Surat Keterangan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data diri pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		b. Salinan Surat Keterangan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data diri pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		c. Surat Rujukan dan Resep Pasien	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data diri pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
		d. Surat persetujuan/penolakan tindakan medis	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data diri pegawai	Subbagian Rumah Tangga Biro Umum
7	AP	ADMINISTRASI PENGHUBUNG				
	AP.01	PENGELOLA ADMINISTRASI PENGHUBUNG				
	AP.01.01	REKRUTMEN PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekrutmen penghubung dimulai dari rencana, pengumuman, seleksi sampai dengan pengangkatan, meliputi:				
		Pra Pelaksanaan Seleksi:				
		1. Undangan Rapat Koordinasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		2. Nota Dinas terkait Pembentukan Tim Panitia Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		3. Rancangan SK Sekjen Tim Seleksi	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		Pelaksanaan Seleksi: 1. Tahapan Pendaftaran:				
		a) Pengumuman Pembukaan/Pendaftaraan Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) Nota Dinas Rekapitulasi Berkas Lamaran Masuk (Lolos/Tidak Lolos Adm)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c) Berita Acara Pembukaan/Pendaftaran Seleksi Administrasi (Laporan Hasil Evaluasi Tim Seleksi, Berkas Lamaran)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d) Undangan Rapat Koordinasi / Narasumber dalam setiap Tahapan Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		2. Tahapan Tes Kemampuan Dasar:				
		a) Pengumuman Tahapan Tes Kemampuan Dasar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b) Nota Dinas Rekapitulasi Berkas Tes Kemampuan Dasar (Lolos /Tidak Lolos)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c) Berita Acara dalam Tes Kemampuan Dasar (Daftar Hadir, Laporan Hasil Evaluasi Tim Seleksi, Kunci Jawaban, Jawaban Peserta, Kumpulan Soal)	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pelaksanaan rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d) Undangan Rapat Koordinasi / Narasumber dalam setiap Tahapan Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		e) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas bnbnbnbb	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		3. Tahapan Tes Karakteristik Pribadi:				
		a) Pengumuman Tahapan Tes Karakteristik Pribadi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b) Nota Dinas Rekapitulasi Berkas Tes Karakteristik Pribadi (Lolos/Tidak Lolos)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c) Berita Acara Tes Karakteristik Pribadi (Daftar Hadir, Laporan Hasil Evaluasi Tim Seleksi, Kunci Jawaban, Jawaban Peserta, Kumpulan Soal)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pelaksanaan rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d) Undangan Rapat Koordinasi/Narasumber dalam setiap Tahapan Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		e) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		4. Tahapan Seleksi Wawancara:				
		a) Pengumuman Tahapan Seleksi Wawancara	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b) Nota Dinas Rekapitulasi Berkas Wawancara (Lolos/Tidak Lolos)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c) Berita Acara Seleksi Wawancara (Daftar Hadir, Laporan Hasil Evaluasi Tim Seleksi, Kunci Jawaban, Jawaban Peserta, Kumpulan Soal)	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data pelaksanaan rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d) Undangan Rapat Koordinasi/Narasumber dalam setiap Tahapan Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		e) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		Pasca Pelaksanaan				
		1. Undangan Rapat Koordinasi/Narasumber	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		2. Berita Acara Pleno / Kelulusan (Undangan Rapat Pleno, Daftar Hadir, Notula Rapat Pleno)	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		3. Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		4. Nota Dinas Pengajuan SK Pengangkatan Calon Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		5. Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		6. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Orientasi Calon Penghubung (Digunakan untuk Pengangkatan Calon menjadi Definitif)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rekrutmen penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.01.02	PELANTIKAN PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelantikan mulai dari proses awal, pengambilan sumpah, Berita Acara dan pelaporan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Rancangan SK Pelantikan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pelantikan penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c. Berita Acara Pelantikan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pelantikan penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		e. Laporan Kegiatan Pelantikan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	AP.01.03	DATA/KETERANGAN ANGGOTA PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan Penghubung termasuk presensi pegawai, meliputi:				
		1) SK Pengangkatan Calon Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		2) Hasil Pengujian Kesehatan	Rahasia	Eselon IV	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		3) Rancangan SK Pengangkatan Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		4) Surat Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		6) SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Koordinator/Asisten Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		7) Berita Acara Pelantikan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		8) Surat Usulan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		9) Berita Acara Pemeriksaan Penghubung	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		10) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin Penghubung	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		11) Surat Keterangan Kembalinya Penghubung yang dinyatakan hilang	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		12) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		13) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Penghubung dan Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		14) Penetapan Kinerja Individu Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		15) Surat Usulan Pengajuan Pemberian Penghargaan kepada Penghubung	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		16) Formulir KP4	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		17) Surat Keterangan untuk melakukan perceraian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		18) Rancangan SK Pemberian Izin Perceraian	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		19) Rancangan SK Pengaktifan Kembali Sebagai Penghubung	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		20) Rancangan SK Pemberhentian sebagai Penghubung	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.01.04	KARTU ANGGOTA PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu tanda Penghubung Komisi Yudisial, meliputi:				
		1) Nota Dinas terkait permohonan pembuatan kartu tanda pengenal Penghubung	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		2) Surat Pengantar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.01.05	BIAYA OPERASIONAL PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan biaya operasional penghubung mulai dari penyusunan rencana kebutuhan biaya operasional penghubung di daerah sampai dengan laporan penggunaan biaya operasional penghubung, meliputi:				
		a. Kuitansi Rampungan	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan biaya operasional penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Daftar Nominatif	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan biaya operasional penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c. Surat Pengantar	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan biaya operasional penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d. Rekapitulasi Pengeluaran	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan biaya operasional penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Surat Pertanggungjawaban Biaya	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan biaya operasional penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		f. Laporan Penggunaan Biaya Operasional	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan biaya operasional penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.01.06	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas penghubung, mulai dari perencanaan sampai dengan laporan kegiatan, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Surat Permohonan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d. Sertifikat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data penghubung	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.01.07	EDUKASI PUBLIK DI WILAYAH PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan edukasi publik di wilayah penghubung mulai dari perencanaan sampai dengan laporan kegiatan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c. Surat Permohonan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.02	EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENGHUBUNG				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	AP.02.01	LAPORAN PERIODIK PENGHUBUNG/LAPORAN KINERJA PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan tugas penghubung terkait laporan masyarakat, pemantauan persidangan, dan sosialisasi serta laporan tugas-tugas lainnya, meliputi:				
		a. Laporan Semester	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Laporan Tahunan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.02.03	PENILAIAN KINERJA PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi dan penilaian kinerja penghubung selama menjalankan tugasnya di daerah, yaitu: Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penghubung di Daerah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.02.04	DATA ANATOMI PERADILAN DI WILAYAH PENGHUBUNG Naskah-naskah yang berkaitan dengan lingkup pengadilan, tematik, pengacara dan stakeholder badan-badan di peradilan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d. Laporan data anatomi Peradilan di Wilayah Penghubung	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data peradilan	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
	AP.03	PENGEMBANGAN JEJARING Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jejaring meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		b. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
		d. Laporan Kegiatan Pengembangan Jejaring	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Administrasi Penghubung Biro Umum
8	KL	KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KL.01	KERJA SAMA				
	KL.01.01	PENJAJAKAN KERJA SAMA DALAM NEGERI Naskah-naskah yang berkaitan dengan penjajakan kerja sama dalam negeri mulai dari korespondensi sampai dengan persetujuan kerja sama dalam negeri, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Penjajakan Kerja Sama dengan K/L terkait	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		e. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		f. Notula Rapat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		g. Rancangan Nota Kesepahaman	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		h. Rancangan Perjanjian Kerja Sama	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		i. Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		j. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
	KL.01.02	PENJAJAKAN KERJA SAMA LUAR NEGERI Naskah-naskah yang berkaitan dengan penjajakan kerja sama luar negeri mulai dari korespondensi sampai dengan persetujuan kerja sama luar negeri, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Penjajakan Kerja Sama dengan pihak terkait	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		e. Notula Rapat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		f. Rancangan LoI/MoU	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		g. Rancangan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri-	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		h. LoI/MoU yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		i. Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		j. surat menyurat terkait kerja sama luar negeri kepada Kementerian Luar Negeri	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
	KL.01.03	KERJA SAMA DALAM NEGERI Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerja sama serta perpanjangannya, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Perpanjangan Kerja Sama dengan K/L terkait	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		f. Notula Rapat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		g. Rancangan Nota Kesepahaman	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		h. Rancangan Perjanjian Kerja Sama	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		i. Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		j. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
	KL.01.04	KERJA SAMA LUAR NEGERI Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerja sama serta perpanjangannya, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Perpanjangan Kerja Sama dengan pihak terkait	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		e. Notula Rapat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		f. Rancangan LoI/MoU	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		g. Rancangan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. LoI/MoU yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		i. Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri yang telah ditandatangani	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		j. surat menyurat terkait kerja sama luar negeri kepada Kementerian Luar Negeri	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
	KL.02	TINDAK LANJUT KERJA SAMA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut kerja sama berupa seminar, workshop dan lain-lain termasuk dengan laporan kegiatannya, meliputi:				
		a. Surat Permohonan Pelaksanaan Kerja Sama dengan K/L terkait	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		b. Undangan Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		c. Undangan kepada Peserta	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		d. Undangan Narasumber dan Fasilitator	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		e. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		f. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		g. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		f. Notula Rapat	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		h. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KL.04	DATA JEJARING KY Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan keterangan Jejaring Komisi Yudisial (Lembaga Negara, Kementerian, Perguruan Tinggi, Ormas dan LSM), yaitu:				
		a. database data dan keterangan Jejaring Komisi Yudisial	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pribadi jejaring KY	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
		b. surat menyurat terkait permintaan data dan jejaring Komisi Yudisial	Terbatas	Eselon IV	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data pribadi jejaring KY	Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum
9	PR	PERENCANAAN				
	PR.01	USULAN PERENCANAAN				
	PR.01.01	TOR/RAB Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja yang meliputi:				
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. TOR, RAB, dan data dukung (yang ditelaah oleh Perencanaan)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait program kerja	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c.Matrikulasi Rencana Penarikan Dana	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Berita Acara Penelaahan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait program kerja	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. TOR, RAB, dan data dukung (yang direviu oleh APIP)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data kerja sama	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.01.02	INISIATIF BARU/NEW INISIATIF Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan inisiatif baru dari masing-masing unit kerja, yang meliputi:				
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. TOR, RAB, dan data dukung (yang ditelaah oleh Perencanaan)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait perencanaan inisiatif baru	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Berita Acara Penelaahan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait perencanaan inisiatif baru	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. TOR, RAB, dan data dukung (yang direviu oleh APIP)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.01.03	HIBAH/BANTUAN PROYEK Naskah-naskah yang berkaitan dengan hibah dari dalam negeri, dari luar negeri, dan/atau donor, yang meliputi:				
		a. Surat Permohonan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait hibah dalam negeri, luar negeri, dan/atau donor	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Usulan Proposal (yang ditelaah Perencanaan)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait perencanaan inisiatif baru	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. DIPA Revisi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait perencanaan inisiatif baru	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Berita Acara Serah Terima	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.01.04	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):				
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Proposal	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Printout Usulan Rencana PNBP	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.02	RENCANA KERJA				
	PR.02.01	RENCANA STRATEGIS Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Rancangan Keputusan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait rencana strategis	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Rencana Strategis	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.02.02	RENCANA KERJA (RENJA) DAN TRILATERAL MEETING Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja Komisi Yudisial termasuk kegiatan trilateral meeting, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Rencana Kerja	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Berita Acara Penelaahan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.03	RENCANA ANGGARAN				
	PR.03.01	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA K/L) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang di dalamnya berisi pagu indikatif maupun definitif, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Berita Acara Penelaahan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.03.02	DIPA/POK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)/Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Rancangan DIPA	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Rancangan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Berita Acara Penelaahan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.03.03	REVISI DOKUMEN ANGGARANNaskah-naskah yang berkaitan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA termasuk revisi anggaran karena permintaan Menteri Keuangan, meliputi:				
		a. TOR,RAB, dan data dukung (yang direviu oleh APIP)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b.Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Surat Pengantar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Matrikulasi Semula Menjadi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Matrikulasi Rencana Penarikan Dana	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Surat Pernyataan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Rancangan DIPA	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Berita Acara Penelaahan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		j. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		k. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		l. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.03.04	STANDAR BIAYA KHUSUS Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran Standar Biaya Khusus, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. TOR, RAB, dan data dukung (yang ditelaah oleh Perencanaan)	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait standar biaya khusus	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c.Berita Acara Penelaahan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait standar biaya khusus	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. TOR, RAB, dan data dukung (yang direviu oleh APIP)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Printout Usulan Aplikasi SBK	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Surat Pengantar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		j. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.04	PEMBAHASAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN				
	PR.04.01	RAPAT KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rapat Kerja Komisi Yudisial mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Rancangan Keputusan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Bahan Rapat Kerja	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Kesimpulan Rapat Kerja	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.04.02	RAPAT DENGAR PENDAPAT Naskah-naskah yang berberkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Bahan Rapat Dengar Pendapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Lembar Persetujuan Komisi III DPR RI	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.05	KINERJA				
	PR.05.01	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Rancangan Keputusan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penyusunan indikator kinerja	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Dokumen IKU	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.05.02	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Dokumen IKK	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.05.03	PENETAPAN KINERJA (PK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Penetapan Kinerja lembaga, Eselon I, II, III, IV, dan Pelaksana meliputi:				
		a. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Dokumen Penetapan Kinerja	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.06	POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN				
	PR.06.01	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan RPJP, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.06.02	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan RPJMN, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.06.03	NOTA KEUANGAN DAN RAPBN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Keuangan dan RAPBN, meliputi:				
		a. Surat Pengantar	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Dokumen Nota Keuangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.07	LAPORAN				
	PR.07.01	LAPORAN BERKALA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan kinerja unit kerja yang disusun seperti, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.07.02	LAPORAN KHUSUS Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain adalah laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti rapat konsultasi dengan DPR RI,, dll meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapata	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Bahan Rapat Konsultasi, dll	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.08	EVALUASI				
	PR.08.01	EVALUASI KEGIATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Laporan Evaluasi Kinerja	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	PR.08.02	LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja dan Renstra yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Berita Acara Penelahaan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. LAKIP	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Perencanaan dan Hukum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
10	HK	HUKUM				
	HK.01	PRODUK HUKUM INTERNAL				
	HK.01.01	PERATURAN KOMISI YUDISIAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Berita Acara Penetapan Peraturan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Position Paper Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		j. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		k. Hasil reviu Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		l. Peraturan yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.01.02	PERATURAN BERSAMA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Bersama, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Berita Acara Persetujuan Substansi Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penyusunan peraturan bersama	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Position Paper Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penyusunan peraturan bersama	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penyusunan peraturan bersama	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		j. Hasil reviu Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penyusunan peraturan bersama	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		k. Peraturan yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.01.03	PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Position Paper Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Hasil reviu Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		j. Peraturan yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.01.04	INSTRUKSI Naskah-naskah yang berkaitan dengan Instruksi Ketua Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris Jenderal, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Rancangan Instruksi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Hasil reviu Instruksi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Instruksi yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.01.06	SURAT EDARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Edaran Ketua Komisi Yudisial, Edaran Sekretaris Jenderal, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Rancangan Surat Edaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Hasil reviu Surat Edaran	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Surat Edaran yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.01.07	KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Komisi Yudisial, meliputi:				
		a.Rancangan Keputusan Ketua Komisi Yudisial	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Hasil reviu Keputusan Ketua Komisi Yudisial	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Keputusan Ketua Komisi Yudisial yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	HK.01.08	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, meliputi:				
		a.Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Hasil reviu Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data produk hukum internal	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.02	PRODUK HUKUM EKSTERNAL				
	HK.02.01	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Naskah Akademik	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data peraturan perundang-undangan	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Rancangan Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data peraturan perundang-undangan	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Hasil reviu Peraturan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data peraturan perundang-undangan	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.03	BANTUAN HUKUM				
	HK.03.01	PIDANA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kejahatan, pelanggaran, pidana khusus, meliputi:				
		a. Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.03.02	PERDATA Naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa mengenai perkara perdata, meliputi:				
		a. Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.03.03	TATA USAHA / ADMINISTRASI NEGARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, meliputi:				
		a. Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.03.04	UJI MATERI Naskah - naskah yang berkaitan dengan uji materi perundang- undangan terkait dengan Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.03.05	SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa kewenangan Komisi Yudisial dengan lembaga lain yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Legal Opinion/Pendapat Hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	HK.03.06	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ PEMBINAAN HUKUM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Bahan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data bantuan hukum	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
11	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	0T.01	ORGANISASI				
	0T.01.01	PENGEMBANGAN ORGANISASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian, penyempurnaan, dan penyusunan struktur organisasi, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan kajian terkait struktur organisasi	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data organisasi	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	0T.01.02	TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS POKOK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan analisis jabatan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data organisasi	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	0T.01.03	REFORMASI BIROKRASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi reformasi birokrasi, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	0T.02	TATA LAKSANA				
	0T.02.01	PROSES BISNIS ORGANISASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses bisnis organisasi, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Rancangan kajian terkait proses bisnis	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Rancangan Proses Bisnis	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data organisasi	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	0T.02.02	PROSEDUR KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan manual, pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja, meliputi:				
		a. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Laporan Kegiatan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Hasil reviu SOP	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait tata laksana	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Rancangan SOP	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait tata laksana	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. SOP pelayanan umum Komisi Yudisial yang telah ditetapkan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data organisasi	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		j. SOP khusus yang telah ditetapkan	Terbatas	Eselon IV/Subkoordinator	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait tata laksana	Subbagian Hukum dan Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
12	KI	KEPATUHAN INTERNAL				
	KI.01	PENGAWASAN				
	KI.01.01	AUDITNaskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi:				
		a. Surat Perintah Biasa	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Surat Perintah Khusus	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengawasan	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Korespondesi Biasa terkait pelaksanaan audit	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Korespondesi Khusus terkait pelaksanaan audit	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengawasan	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Nota Dinas Biasa	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Nota Dinas Khusus	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengawasan	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		h. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		i. Berita Acara Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengawasan	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		j. Laporan Telaah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengawasan	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		k. Laporan Akhir (Biasa)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		l. Laporan Akhir (Khusus)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.01.02	RIVIEW LAPORAN KEUANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Korespondesi Biasa terkait pelaksanaan reviu	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Pernyataan Hasil Reviu	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.01.03	MONITORING DAN EVALUASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta monitoring dan evaluasi kegiatan lainnya, yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Korespondesi Biasa terkait pelaksanaan monev	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.01.04	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sampai dengan laporan, yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Korespondesi Biasa terkait hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Pengawasan Lainnya	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.01.05	HASIL PENGAWASAN LAIN Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil kegiatan pengawasan lainnya, yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Korespondesi terkait hasil kegiatan pengawasan lainnya	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.02	NON PENGAWASAN				
	KI.02.01	ASISTENSI/KONSULTASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asistensi atau konsultasi mengenai keuangan, pajak, Barang Milik Negara, Perencanaan keuangan LHKPN, yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Korespondesi terkait hasil kegiatan asistensi atau konsultasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Hasil Kegiatan Asistensi atau Konsultasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.02.02	PENYELENGGARAAN SPIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan SPIP, yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Korespondesi terkait hasil kegiatan penyelenggaraan SPIP	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Laporan Hasil Kegiatan penyelenggaraan SPIP	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
	KI.02.03	NON PENGAWASAN LAINNYA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan non pengawasan lainnya, seperti reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Standar Biaya Khusus (SBK), yang meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		b. Korespondesi Biasa terkait kegiatan non pengawasan lainnya	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		c. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		e. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		f. Surat Pernyataan Hasil Reviu	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		g. Laporan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
13	AN	ANALISIS				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	AN.01	HAKIM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis atau penelitian mengenai hakim dan putusan hakim, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis putusan hakim	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Rancangan Pedoman Penelitian	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan SK	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Laporan Hasil Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis putusan hakim	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis putusan hakim	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		k. Laporan Karakterisasi Putusan Hakim	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis putusan hakim	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	AN.02	KELEMBAGAAN				
	AN.02.01	INTERNAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis atau penelitian mengenai kelembagaan terutama tentang Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis kelembagaan	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Rancangan Pedoman Penelitian	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan SK	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Laporan Hasil Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis kelembagaan	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Laporan Hasil Kajian Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis kelembagaan	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	AN.02.02	EKSTERNAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis atau penelitian mengenai kelembagaan terutama tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan, meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis kelembagaan	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Rancangan Pedoman Penelitian	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan SK	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Laporan Hasil Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis kelembagaan	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Laporan Hasil Kajian Tematik	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait analisis kelembagaan	Bidang Analisis Pusat Analisis dan Layanan Informasi
14	DT	DATA				
	DT.01	DATABASE HAKIM Naskah-naskah yang berkaitan dengan data-data hakim seluruh Indonesia, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terkait pengelolaan database hakim	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Report Rekam Jejak Hakim Hasil Cetak Aplikasi	Rahasia	Eselon III	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	DT.02	CETAK BIRU DAN ROADMAP TIK Naskah-naskah yang berkaitan dengan cetak biru Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data cetak biru dan roadmap TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data cetak biru dan roadmap TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait data hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Cetak biru TIK Komisi Yudisial	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data data cetak biru dan roadmap TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. Roadmap TIK Komisi Yudisial	Rahasia	Eselon II	Mengganggu fungsi penyelenggaraan negara di bidang kerahasiaan data data cetak biru dan roadmap TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terkait Penyusunan Cetak Biru dan Roadmap TIK Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	DT.03	DOKUMENTASI				
	DT.03.01	LIPUTAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan liputan meliputi:				
		a. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Berita	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Foto dan Video	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait kegiatan liputan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	DT.03.02	KLIPING DAN ANALISIS MEDIA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kliping dan analis media yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Kliping	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Laporan analis media	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait hasil analis media	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
15	LI	LAYANAN INFORMASI				
	LI.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA				
	LI.01.01	Cetak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan media cetak, meliputi:				
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Bahan Media Cetak	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media cetak	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media cetak	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media cetak	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.01.02	Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media Elektronik, meliputi:				
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Naskah Hasil Editing	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media elektronik	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Rekaman Audio dan Visual	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media elektronik	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media elektronik	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.01.03	Online Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media online, meliputi:				
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Berita	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Naskah Hasil Editing	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Berita di website	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Surat Perintah-	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.02	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan, meliputi:				
		a. Buku Induk Perpustakaan Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Daftar Pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Daftar Usulan Pengadaan Buku Perpustakaan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. OPAC (Open Access Catalogues)	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.03	PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA ONLINE Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media online, meliputi:				
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Konten Digital	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Hasil Editing Konten Digital	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Konten Digital di Media Sosial	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait pengelolaan media online	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.04	SOSIALISASI				
	LI.04.01	KELEMBAGAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi mengenai kelembagaan Komisi Yudisial, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi kelembagaan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Term of References	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi kelembagaan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Bahan Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi kelembagaan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Bahan Sosialisasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi kelembagaan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi kelembagaan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi kelembagaan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.04.02	KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi mengenai Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi KEPPH	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Term of References	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi KEPPH	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Bahan Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi KEPPH	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Bahan Sosialisasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi KEPPH	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi KEPPH	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sosialisasi KEPPH	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.04.03	PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM (PPIH) APARAT PENEGAK HUKUM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Integritas Hakim terhadap Aparat Penegak Hukum, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Term of References	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Bahan Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Bahan Sosialisasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.04.04	PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM (PPIH) NON APARAT PENEGAK HUKUM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Integritas Hakim terhadap Non Aparat Penegak Hukum meliputi masyarakat buta hukum:				
		a. Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Term of References	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Rancangan Bahan Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Bahan Sosialisasi	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait peningkatan integritas hakim	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.04.05	KEHUMASAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan, meliputi:				
		a. Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait kehumasan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait kehumasan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait kehumasan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait kehumasan	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.05	PENERBITAN				
	LI.05.01	JURNAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan Jurnal Komisi Yudisial meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah,editing, pencetakan dan pendistribusian, meliputi:				

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Naskah Hasil Editing	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan jurnal	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Rancangan Desain dan Layout	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan jurnal	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Dummy	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan jurnal	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan jurnal	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Hasil Cetakan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan jurnal	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan jurnal	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		k. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		l. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.05.02	MAJALAH Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan Buletin Komisi Yudisial meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, editing, pencetakan dan pendistribusian, meliputi:				
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Naskah Hasil Editing	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buletin	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Rancangan Desain dan Layout	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buletin	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Dummy	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buletin	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buletin	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Hasil Cetakan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buletin	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buletin	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		k. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		l. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.05.03	BUKU Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan Buku Komisi Yudisial meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, penentuan tema, penulisan buku,editing, pencetakan dan pendistribusian.				
		a. Notula Rapat	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Term of References	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Naskah Hasil Editing	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buku	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Rancangan Desain dan Layout	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buku	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Dummy	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buku	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Surat Perintah Kerja	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buku	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Hasil Cetakan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buku	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait penerbitan buku	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		k. Nota Dinas	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		l. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	LI.06	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan pendokumentasi informasi publik di Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Lembar Disposisi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Jawaban Surat Permohonan Informasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Tanggapan atas Keberatan Pemohon Informasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Rancangan SK	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan Naskah Informasi Publik	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Surat Undangan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Informasi Publik Digital	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian konsekuensi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		k. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		l. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait PPID	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
16	SI	SISTEM INFORMASI				
	SI.01	PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN APLIKASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi yang ada di Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sistem informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sistem informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sistem informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Laporan Analisa Kebutuhan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sistem informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Laporan Pembangunan aplikasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sistem informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		i. Laporan Upgrade aplikasi	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait sistem informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		j. Daftar Petugas Perekaman	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		k. Jadwal Pelaksanaan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	SI.02	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TIK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait infrastruktur TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait infrastruktur TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait infrastruktur TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Laporan Penambahan Infrasruktur Baru	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait infrastruktur TIK	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Kuitansi Biaya Penambahan kuota sms gateway	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	SI.03	JARINGAN INTERNET Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan jaringan internet di Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait jaringan internet	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait jaringan internet	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait jaringan internet	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Laporan Instalasi Jaringan Internet	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait jaringan internet	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Laporan Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait jaringan internet	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	SI.04	KEAMANAN INFORMASI (ISO 27001:2013) Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) ISO 27001:2013 di Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait keamanan informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait keamanan informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait keamanan informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Dokumen Induk implementasi SMKI	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait keamanan informasi	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		h. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terkait Implementasi SMKI	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
	SI.05	SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada di Komisi Yudisial, meliputi:				
		a. Nota Dinas	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait SPBE	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		b. Surat Undangan	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		c. Daftar Hadir	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		d. Notula Rapat	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait SPBE	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		e. Surat Perintah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		f. Laporan Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Mengganggu pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial terkait SPBE	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		g. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terkait Tim SPBE	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN (Biasa/Terbatas/Rahasia)	HAK AKSES (Serendah-rendahnya)	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		h. Hasil Asesmen SPBE	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Komisi Yudisial	Bidang Data dan Layanan Informasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,

ARIE SUDIHAR